

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori yang menjadi dasar pokok permasalahan. Teori yang akan dibahas dalam bab ini meliputi definisi kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, pengangguran, inflasi, serta hubungan antara variabel. Selain itu akan dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan yang akan diteliti.

2.1. Kemiskinan

2.1.1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara terutama negara berkembang, tidak terkecuali negara Indonesia. Secara umum, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar atas setiap aspek kehidupan. Akan tetapi ada banyak definisi dan konsep tentang kemiskinan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengartikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Badan Pusat Statistik (2014) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemudian menurut Kuncoro (2000) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang atau suatu daerah tidak

dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak atau dapat dikatakan tidak dapat meningkatkan standar hidup lebih baik.

2.1.2. Indikator Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik indikator kemiskinan terdiri dari: Pertama, *Head Count Index*, yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Kedua, *Poverty Gap Index* yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin (BPS,2014).

Selain itu terdapat indikator utama kemiskinan lain yaitu:

- 1) Pendapatan/konsumsi per minggu/bulan/tahun, yang paling umum digunakan untuk mengukur apakah seseorang itu miskin atau tidak adalah jumlah pendapatan dari hasil kerja/usaha rata-rata per minggu, per bulan, atau per tahun.
- 2) Aset, jumlah atau nilai aset, seperti tanah, rumah/gedung, dan aset-aset lainnya yang bergerak juga bisa digunakan sebagai salah satu indikator kemiskinan.
- 3) Total kekayaan, jumlah kekayaan seseorang (atau sebuah keluarga) adalah perdefinisi jumlah dari semua aset yang dimiliki orang itu ditambah dengan jumlah pendapatan yang didapatnya dari segala sumber, termasuk sebagai pekerja atau pegawai.

- 4) Makanan yang dikonsumsi, menyoroti makanan sebagai salah satu indikator kemiskinan harus terutama melihat pada dua hal, yakni porsi dan kualitas dari makanan yang dikonsumsi.
- 5) Tempat tinggal, bisa dalam arti rumah dan lokasi dimana rumah itu berada.
- 6) Pendidikan formal, merupakan salah satu aspek penting dari kemiskinan.
- 7) Infrastruktur dasar rumah tangga yaitu, air bersih, sanitasi layak, listrik yang cukup, telekomunikasi, dan transportasi yang baik.
- 8) Kesehatan, seperti halnya pendidikan, kesehatan juga dilihat sebagai salah satu aspek penting dari kemiskinan dan oleh karena itu, dianggap sebagai salah satu indikator penting untuk menggambarkan kemiskinan di suatu wilayah/masyarakat (Tambunan, 2015).

Secara umum terdapat dua jenis ukuran kemiskinan yang digunakan yaitu: kemiskinan absolut merupakan situasi ketidakmampuan atau nyaris tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Todaro, Smith: 2011). Sedangkan kemiskinan relatif dimana tinggi rendahnya tingkat kemiskinan ditentukan oleh lingkungan sekitarnya (Arsyad, 2010).

2.1.3. Penyebab Kemiskinan

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan (Todaro dan Smith, 2011) adalah tingkat pendapatan rendah, laju pertumbuhan ekonomi lambat, distribusi pendapatan tidak merata, fasilitas kesehatan dan pelayanan yang

terbatas, serta fasilitas pendidikan masih belum memadai. Penyebab kemiskinan yang lain yaitu: pendidikan yang terlampau rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal, dan beban keluarga. Rendahnya pendidikan menyebabkan seseorang mempunyai sedikit keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupan. Dengan adanya keterbatasan pendidikan atau keterampilan mempersulit seseorang untuk memasuki dunia bisnis atau dunia kerja. Adanya sikap malas yang dimiliki seseorang menyebabkan orang tersebut tidak bersemangat dalam bekerja (Aziz, 1997 dalam Annur, 2013).

Menurut Teori Malthus (Todaro, 2006) pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara akan menyebabkan terjadinya kemiskinan kronis. Malthus menggambarkan suatu kecenderungan *universal* bahwa jumlah populasi di suatu negara akan meningkat sangat cepat menurut deret ukur. Sementara itu, karena adanya proses penambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap yaitu tanah, maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung. Karena pertumbuhan pengadaan pangan tidak dapat berpacu secara memadai terhadap kecepatan peningkatan penduduk, maka pendapatan perkapita cenderung terus mengalami penurunan sampai sedemikian rendahnya sehingga segenap populasi harus bertahan pada kondisi sedikit di atas tingkat subsisten.

World Bank mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari perspektif akses dari individu terhadap sejumlah aset yang penting dalam menunjang kehidupan, yaitu aset dasar kehidupan (contohnya kesehatan dan ketrampilan/

pengetahuan), aset alam (misalnya tanah pertanian atau lahan olahan), aset fisik (modal, sarana produksi, infrastruktur), aset keuangan (contohnya kredit bank dan pinjaman lainnya) kemudian aset sosial (jaminan sosial dan hak politik). Hilangnya akses dari satu atau lebih dari aset diatas menyebabkan seseorang jatuh terjerembab kedalam kemiskinan.

Tidak hanya itu faktor penyebab kemiskinan antara lain rendahnya kesehatan, gizi serta kurangnya perbaikan mutu pendidikan. Maka dari itu pemerintah harus memperbaikinya dengan melakukan perbaikan mutu pendidikan, perbaikan gizi dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

Dalam kegiatan perekonomian pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara. Untuk memberikan gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang di capai suatu negara ukuran yang sering di gunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan riil yang dicapai. Di negara berkembang konsep Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu konsep yang paling penting jika dibandingkan dengan kosep pendapatan nasional lainnya. Produk Domestik Bruto (PDB) diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu (Sukirno, 2009). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau

merupakan jumlah dari seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Selain digunakan untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara negara maju dan negara sedang berkembang, pendapatan per kapita juga dapat digunakan sebagai indikator pembangunan. Pendapatan per kapita dapat memberikan gambaran mengenai laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara dapat juga menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di berbagai negara. Akan tetapi dalam menggunakan pendapatan per kapita sebagai salah satu indikator pembangunan harus hati-hati. Dikarenakan adanya pendapat yang menyebutkan bahwa pembangunan bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan riil saja, akan tetapi kenaikan tersebut harus berkesinambungan dan mantap serta harus disertai pula oleh perubahan sikap dan kebiasaan sosial yang sebelumnya menghambat kemajuan ekonomi. Pendapatan per kapita memfokuskan pada *raison d'être* dari pembangunan, yaitu kenaikan tingkat hidup dan menghilangkan kemiskinan (Arsyad, 2004).

Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, pakaian, membayar pendidikan, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang lainnya. Jika rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya maka akan menurunkan kemiskinan dan yang terjadi adalah kesejahteraan. Namun sebaliknya, jika rumah tangga tidak mendapatkan pendapatan maka akan menaikkan tingkat kemiskinan, karena rumah tangga tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

2.3. Pengangguran

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang begitu cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat mengakibatkan masalah pengangguran di negara sedang berkembang semakin serius. Untuk membedakan jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkan, yaitu (Sukirno, 2009) : pertama, berdasarkan kepada penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut. kedua, berdasarkan kepada ciri pengangguran yang wujud. Berdasarkan penggolongan tersebut, pengangguran dapat dibedakan menjadi empat tipe (Sukirno, 2009), yaitu :

1. Pengangguran Friksional atau Normal. Pada pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak mendapatkan pekerjaan, akan tetapi dikarenakan sedang mencari pekerjaan yang lebih baik.
2. Pengangguran Siklikal. Permintaan agregat yang lebih tinggi akan mendorong pengusaha menaikkan produksinya. Banyak pekerja yang digunakan dan akan menurunkan pengangguran. Akan tetapi suatu saat, permintaan agregat mengalami penurunan dan penurunan ini yang menyebabkan efek kepada perusahaan lain yang berhubungan. Perusahaan yang terkena dampaknya juga akan mengalami kemerosotan dalam produksinya , mengurangi pekerja atau bahkan menutup perusahaannya.
3. Pengangguran Struktural. Semua industri dalam suatu perekonomian pasti akan mengalami suatu penurunan. Penurunan yang dialaminya tersebut dapat disebabkan beberapa faktor berikut : adanya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi yang akan mengurangi permintaan, biaya

pengeluaran yang terlalu tinggi, tidak mampu bersaing. Penurunan tersebut akan mengakibatkan produksi yang semakin berkurang dan perusahaan akan memberhentikan sebagian pekerjanya.

4. Pengangguran Teknologi. Pengangguran dapat ditimbulkan karena pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Misalnya suatu perusahaan menggantikan tenaga manusia dengan adanya robot-robot yang bekerja.

2.4. Inflasi

Selain pengangguran, masalah lain yang terus menjadi sorotan pemerintah adalah adanya inflasi. Pemerintah memiliki tujuan jangka panjang yaitu untuk menjaga tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Menghadapi permasalahan inflasi yang bertambah cepat, maka pemerintah akan merancang langkah yang bertujuan agar harga dapat stabil kembali. Berdasarkan sumber atau penyebab kenaikan harga yang berlaku, inflasi dibedakan menjadi tiga bentuk (Sukirno, 2009), yaitu :

- a. *Demand pull inflation*. Inflasi ini biasanya terjadi saat perekonomian berkembang dengan sangat pesat. Kesempatan kerja tinggi akan menciptakan tingkat pendapatan tinggi dan selanjutnya dapat menyebabkan pengeluaran melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan tersebut akan menyebabkan adanya inflasi.
- b. *Cost push inflation*. Inflasi yang satu ini berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Jika

perusahaan masih mengalami kenaikan permintaan, perusahaan tersebut akan menaikkan produksinya dengan cara memberikan gaji dan upah lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari karyawan baru dengan memberikan tawaran upah yang lebih tinggi. Hal tersebut akan berdampak pada biaya produksi meningkat dan menyebabkan kenaikan harga berbagai barang.

- c. *Imported inflation*. Inflasi akan terjadi jika harga barang-barang impor mengalami kenaikan. Harga mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan.

2.5. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.5.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Kemiskinan

Pendekatan pembangunan tradisional lebih diartikan sebagai pembangunan yang memfokuskan pada usaha peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, maupun kota (Kuncoro, 2006). Pendapatan daerah menjadi salah satu sumber dari aktivitas kerja penduduk untuk menghasilkan output dan sebagai imbalan masyarakat memperoleh pendapatannya.

Pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan berguna untuk memenuhi kebutuhan pokok dan konsumsipun akan meningkat seiring dengan pendapatan yang diterima. Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya akan mengalami kemakmuran dan keluar dari kemiskinan yang menjerat. Hal ini akan berdampak juga pada negara yaitu akan menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi.

2.5.2. Pengangguran dan Kemiskinan

Menurut Arsyad (2004), menyatakan bahwa salah satu mekanisme untuk menurunkan kemiskinan dan kepincangan distribusi pendapatan di negara berkembang adalah dengan memberikan upah yang memadai dan menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok penduduk miskin. Sehingga peningkatan kesempatan kerja merupakan aspek yang paling esensial dalam setiap strategi pembangunan yang menitikberatkan kepada penghapusan kemiskinan.

Pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan efek buruk pada pemerataan pembagian pendapatan. Semakin tinggi pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak memperoleh pendapatan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa usaha menaikkan kesempatan kerja akan digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat (Sukirno, 2009).

2.5.3. Inflasi dan Kemiskinan

Kenaikan harga-harga menimbulkan efek yang buruk ke dalam perekonomian negara. Di samping menimbulkan efek buruk dalam kegiatan perekonomian negara, inflasi juga akan menimbulkan efek kepada individu dan masyarakat. Pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Inflasi dapat memperburuk prospek pertumbuhan jangka panjang, mengurangi pendapatan riil, mengurangi nilai kekayaan berbentuk uang dan memperburuk distribusi pendapatan (Sukirno, 2009).

2.4. Studi Terkait

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan telah dilakukan sebelumnya. Rusdarti dan Sebayang (2013), meneliti Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan menganalisis pengaruh PDRB, pengangguran, dan belanja publik (bidang kesehatan, dan infrastruktur terhadap kemiskinan). Analisis data menggunakan teknik *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Faktanya bahwa jumlah orang miskin di daerah lebih besar daripada kota. Secara statistik, PDRB dan variabel lainnya seperti pengeluaran pemerintah publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran pengaruhnya tidak signifikan.

Hapsoro dan Gunanto (2013), melakukan penelitian mengenai Pengaruh Variabel Makroekonomi Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan Di Indonesia Dalam Periode 2007-2010. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel ekonomi seperti PDRB, jumlah pengangguran, dan tingkat inflasi terhadap kemiskinan kota di Indonesia. Analisis penelitian ini menggunakan data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel jumlah pengangguran dan tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan kota di Indonesia.

Barika (2013), melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera. Penelitian ini menggunakan data panel dengan tahun pengamatan 2007-2011. Estimasi regresi data panel menggunakan pendekatan *Random Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera. Belanja pemerintah yang tinggi dapat menurunkan kemiskinan dan sebaliknya, sedangkan pengangguran yang tinggi menyebabkan kenaikan angka kemiskinan di Sumatera.

Penelitian yang dilakukan oleh Ketut dan Wayan (2013), mengenai Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, Dan Struktur Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali Periode 1995-2013. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil analisis berdasarkan empat variabel menunjukkan adanya pengaruh secara simultan PDRB, pendidikan, dan struktur tenaga kerja pertanian terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Variabel PDRB dan tingkat pendidikan dalam hal ini rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan struktur tenaga kerja di sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali, tahun 1995-2013.

Leasiwal (2013), melakukan penelitian mengenai Determinan Dan Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Maluku. Teknik analisis yang digunakan penelitian ini menggunakan data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam variabel yang secara

signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu daya beli masyarakat, inflasi, pendidikan yang terdiri atas rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan angka partisipasi kasar, serta angka harapan hidup. Sedangkan faktor yang paling dominan mempengaruhi kemiskinan di Maluku yaitu angka harapan hidup. Karakteristik kemiskinan diantaranya adalah mayoritas penduduk miskin bergerak pada sektor informal.

